



RANWAL 2024

**DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA
BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas tersusunnya Rancangan Awal Kinerja (Ranwal) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Awal Kinerja (Ranwal) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Rancangan Awal Kinerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Awal Kinerja ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rancangan Awal Kinerja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Batam, 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA BATAM**

Drs. SULEMAN NABABAN

NIP. 19630112 199103 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rancangan Awal Satuan Kerja (Ranwal-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,) ;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) ;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
12. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan awal tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Secara umum tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sedangkan Tujuan khusus dari penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun sebelumnya
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
4. Review terhadap rancangan Awal RKPD;
5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rancangan awal PD serta Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Awal Kinerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaran program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 13,054,323.119.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA BATAM

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2021	Target renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun n-2	Tingkat realisasi (%)	2023	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					2022	2022			2023	
1	2	3	4	5	6	7	(8)= (7) : (6)	9	(10)= (5) + (7)	(11) = {(10): (4)}*100%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	53 %	100%	52,99%	52,99%	100%	52,99%	52,99%
2	17	1	02.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	47 %	100%	46,98%	46,98%	100%	46,98%	46,98%
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	2 %	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	100%	38 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	80,49%
2	17	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	12 Dokumen	41 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	17	1	02.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrai Umum Perangkat Daerah	100 %	56 %	100%	56,41%	56,41%	100%	56,41%	56,41%
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	93 %	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	82 %	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45 %	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	25%
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	62 %	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	61 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

2	17	1	02.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	82 %	100%	81,94%	81,94%	100%	81,94%	81,94%
2	17	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	72 %	1 Paket	1 Paket	100%	0	1 Paket	100%
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	92 %	48 Unit	48 Unit	100%	0	48 Unit	100%
2	17	1	02.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	53 %	100%	53,01%	53,01%	100%	53,01%	53,01%
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Lapopran	100%
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	17	1	02.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	48 %	100%	48,43%	48,43%	100%	48,43%	48,43%
2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75 %	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	42 %	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	75%
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	28 %	38 Unit	38 Unit	100%	38 Unit	20 Unit	35,71%
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 %	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	32.02 %	0 %	26,94%	0	0%	26,94%	0%	0%
2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	2,96 %	0 %	0,77%	0	100%	0,77%	0%	0%
2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	120 Unit Usaha	0 %	50 Unit	50 Unit	100%	35 Unit	0%	0%
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %	0 %	0	0	0%	0	0%	0%
2	17	4	02.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	41.67 %	0 %	100%	0	0%	0	0%	0%
2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit	0	100 Unit	0	0%	0	0%	0%

2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	30.79 %	2 %	21,38%	22,47%	105%	21,38%	22,47%	72,98%
2	17	5	02.01		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dilatih	53,06%	1 %	52,34%	27,94%	53,32%	52,40%	27,94%	52,66%
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi (Pengurus) yang dilatih	180 Orang	28 %	91 orang	100 Orang	109,9 %	131 orang	100 Orang	58,14%
2	17	5	02.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	16.76 %	94 %	10,53%	10,35%	100 %	15%	10,35%	38,48%
2	17	5	02.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih	180 Unit Usaha	1 %	72 Unit Usaha	72 Unit Usaha	100%	105 Unit Usaha	72 Unit Usaha	14,40%
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	39.21 %	0	30 %	0	0%	30%	0%	0
2	17	7	02.01		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	729 Unit	0	300 Unit	0	0%	101 Unit	0%	0
2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Unit Usaha	0	0	0	0%	0	0%	0

2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	250 Unit	0	150 Unit	150 Unit	100%	100 Unit	150 Unit	27,27%
2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina dan bernilai tambah	200 Orang	0	0	0	0%	0	0%	0
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	124 %	42,15 %	24,61%	58,37 %	42,15%	24,61%	45,75%
2	17	8	02.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	540 Unit	1 %	360 Unit	108 Unit	30 %	360 Unit	108 Unit	10,80%
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	540 Unit	41 %	210 Unit	37 Unit	17,62 %	300 Unit	37 Unit	4,93%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Th 2021 (th-2)	Th 2022 (th-1)	Th 2023 (th-2)	Th 2024 (th+1)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase koperasi yang aktif	-	√	0,00%	26.94%	27.70%	28.81%	30.23%	32.02%	2,55%	3,73%	56%	80%	
2	Persentase koperasi yang sehat	-	√	0,00%	0,00%	80%	83.33%	88.89%	91.67%	40%	55%	100%	100%	
3	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	-	√	18.59%	21.38%	23.77%	25.36%	27.26%	30.79%	35%	60%	100%	100%	
4	Persentase peningkatan kinerja (nilai omzet) koperasi	-	√	0.00%	21%	0.00%	0.00%	24%	0.00%	20%	21%	100%	100%	
5	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	-	√	27.03%	30%	34.45%	35.34%	37.45%	39.21%	26.94%	43.34%	100%	100%	
6	Persentase usaha mikro ekonomi kreatif	-	√	26.32%	42.15%	43.76%	45.45%	48.60%	53.79%	23.24%	24.85%	100%	100%	

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Kurang Adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima cukup tinggi.

2. Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan tergantung kualitas produk (a.1 : Ketersediaan bahan baku, pengolahan, kemasan dan legalitas), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

3. Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di mainland sangat mudah dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di sisi lain pelaku

ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesibilitas kepada sumber daya ekonomi.

5. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan ahli teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain: Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good government, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro melalui PLUT KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro meningkat.
- e. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, usaha Mikro melalui BLUD serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank.
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

❖ Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.
- b. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan UKM Bantuan perkuatan permodalan

bagi Koperasi dan UMKM belum dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

- c. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi
- e. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi, peluang pasar.
- f. Kualitas produk belum berdaya saing.
- g. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat Rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM.
- h. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM.

❖ **Peluang dan Tantangan**

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Batam tengah di hadapkan dengan berbagai macam tantangan antara lain;

- a. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
- b. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
- c. Adanya pergantian kepemimpinan Koperasi;
- d. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD;
- f. Belum Validnya data UMKM;
- g. Adanya Perubahan Regulasi.

Namun dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Batam ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian;
- Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kota Batam;
- Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya;
- Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUMKM semakin mudah untuk mendapatkan permodalan;
- Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja;
- Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media Informasi;
- Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya tarik;
- Peraturan perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM, Permen tentang KUMKM, PP tentang KUMKM, Perda tentang KUMKM) memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha KUMKM;
- Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR;
- Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM Meningkatkan arus investasi asing ke Kota Batam;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Batam Tahun 2024, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2024. Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2024 menjadi Rencana Kerja tahun 2024, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja tahun 2024. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.689.968.478	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.989.725.737	
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	8.919.595.988	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	8,828,478,937	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	41 orang	8.840.577.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	41 orang	8,778,238,937	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	79.018.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	50,240,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	260.958.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	292,425,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah target Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3.355.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	20,927,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	53.411.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	63,247,000	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	38.183.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	15,114,000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	26.592.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	15,065,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	139.415.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178,072,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	192.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	518,648,000	
1	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	48 Unit	192.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	48 Unit	518,648,000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	699.448.640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	707,406,800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	322.460.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	322,460,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum Umum Kantor yang	12 Laporan	376.988.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	384,946,800	
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	617.565.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	642,767,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	38.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,280,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Unit	140.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140,400,000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	43.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	40,650,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor yang Pelihara/Rehabilitasi	2 unit	395.865.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	423,437,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi Aktif	28.81 %	146.837.345	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi Aktif	32,02%	196,321,000	
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	6.74 %	146.837.345	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	2,96%	196,321,000	
1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	146.837.345	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	196,321,000	
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	83.33 %	125.266.176,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	91,67%	139,552,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	43.48 %	125.266.176,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	41,67%	139,552,500	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30 Unit Usaha	125.266.176,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	50 Unit Usaha	139.552.500	
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	26.49 %	528.783.454	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	30,79%	463,838,000	
I	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dilatih	59.35 %	277.624.309	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	138 orang	241,109,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	165 Orang	277.624.309	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	180 Orang	241.109.500	
II	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	19,79%	251.159.145	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	16,76%	222,728,500	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Batam	Jumlah UKM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	270 Unit Usaha	251.159.145	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	180 Unit Usaha	222.728.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	1.061.042.741	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	39,21%	806,460,500	
I	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Jumlah UKM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	482 Unit Usaha	1.061.042.741	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Terlaksananya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	39,21%	806.460.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	110 Unit Usaha	393.010.200	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Unit Usaha	252,538,000	
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	350 Unit Usaha	366.724.721	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	268,286,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	22 Orang	301.307.820	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	285,636,000	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	45.45 %	1,012,609,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	1,768,483,000	
I	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	620 Unit Usaha	1,012,609,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	470 Unit Usaha	1,768,483,000	
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	620 Unit Usaha	1,012,609,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	540 Unit Usaha	1,768,483,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta Desain dan Teknologi			Teknologi		serta Desain dan Teknologi			

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem SIPD yang diajukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA BATAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)		Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif		
a	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Patam Lestari	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Packaging di 100 Orang	Pokir
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Teluk Tering	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 50 Orang	Pokir
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tanjung Buntung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 50 Orang	Pokir
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tembesi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 100 Orang	Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2026. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2021-2026 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Koperasi Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini DISKUM Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih professional.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Tahun 2024

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target 2024
1	2	3	4	5
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro			28,21%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terhadap Layanan Kesekretariatan	100%
		Meningkatnya produktifitas Koperasi di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Koperasi	23,00%
		Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	58,59%
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah			78,07%
		Meningkatkan Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	27,00%

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja DISKUM Kota Batam tahun 2024 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional didukung DISKUM Kota Batam melalui sasaran kinerja DISKUM Kota Batam tahun 2024 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah :

“Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan Perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif”

Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan
2. Peningkatan produktifitas usaha dan kelembagaan koperasi
3. Meningkatkan pengawasan koperasi sector rill dan usaha simpan pinjam
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan daya saing Koperasi
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui pengembangan SDM, produksi, pengolahan, pemasaran, desain dan teknologi
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public
7. Meningkatkan SDM Perangkat Daerah yang diberi pendidikan dan pelatihan lanjutan

8. Meningkatkan penggunaan system informasi dalam proses pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Koperasi Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas koperasi dan usaha mikro di Kota Batam
2. Meningkatkan peran usaha mikro ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Batam
3. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usha Mikro Kota Batam

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2022 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan,

kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- c) Penyediaan bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan. Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub sub kegiatan:
 - a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
 - e) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - f) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Tabel 3.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2023, PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA BATAM**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100 %	10.689.968.478			100 %	11.873.912.731	
2	17	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	8.919.595.988			100 %	9.412.555.851	
2	17	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	41 Orang/bulan	8.840.577.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41 Orang/b ulan	9.330.622.087
2	17	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	79.018.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokume n	81.933.764

2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam		0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	57.200.000
2	17	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Kota Batam		0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	57.200.000
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100 %	260.958.050			100 %	400.587.403
2	17	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	3.355.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	3.479.577
2	17	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	53.411.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	55.382.177
2	17	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	38.183.500	Pendapatan asli daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Paket	39.592.471
2	17	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	26.592.500		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	27.573.763
2	17	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	139.415.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	274.559.414

2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	192.400.000			100 %	587.967.808
2	17	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Kota Batam		0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		99.978.832
2	17	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	48 Unit	192.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48 Unit	249.488.976
2	17	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	0 Unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48 Unit	238.500.000
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	699.448.640			100 %	725.258.295
2	17	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	322.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	334.358.774
2	17	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	376.988.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	390.899.521

2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100 %	617.565.800			100 %	690.343.374
2	17	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	38.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	39.692.532
2	17	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 Unit	140.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Unit	145.580.760
2	17	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	56 Unit	43.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	56 Unit	44.607.438
2	17	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	395.865.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	460.462.644
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Kota Batam	83.33%	125.266.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.89%	129.888.497,89

2	17	4	2.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	Kota Batam	43.48%%	125.266.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.56%	129.888.497,89
2	17	4	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kota Batam	30 Unit Usaha	125.266.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 Unit Usaha	129.888.497,89
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Kota Batam	28.81 %	146.837.345			30.23 %	152.123.490
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Kota Batam	6.74 %	146.837.345			7.08 %	152.123.490
2	17	3	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	65 Unit Usaha	146.837.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi Aktif	70 Unit Usaha	152.123.490
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	Kota Batam	26.49 %	528.783.454			27.83 %	548.069.520

2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	59.35 %	277.624.309			56.86 %	287.868.646
2	17	5	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	165 Orang	277.624.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi dan Usaha Mikro	170 Orang	287.868.646
2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	Kota Batam	19.79 %	251.159.145			21.52 %	260.200.875
2	17	5	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Kota Batam	270 Unit Usaha	251.159.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	400 Unit Usaha	260.200.875
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi		0%	0			24%	461.084.544
2	17	6	1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UMKM Koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya		0%	0			53.51%	461.084.544

2	17	6	1.01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan		0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi aktif	160 Unit Usaha	461.084.544
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	Kota Batam	35.34 %	1.061.042.741			37.45 %	1.100.195.218
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	Kota Batam	482 Unit Usaha	1.061.042.741			655 Unit Usaha	1.100.195.218
2	17	7	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	110 Unit Usaha	393.010.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	130 Unit Usaha	407.512.276
2	17	7	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Kota Batam	350 Unit Usaha	366.724.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	500 Unit Usaha	380.256.863

2	17	7	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Batam	22 Orang	301.307.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	25 Orang	312.426.079
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	Kota Batam	45.45 %	1.943.060.899			48.60 %	2.014.759.846
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Kota Batam	620 Unit Usaha	1.943.060.899			850 Unit Usaha	2.014.759.846
2	17	8	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	620 Unit Usaha	1.943.060.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro Kreatif	850 Unit Usaha	2.014.759.846
TOTAL									14.494.959.093				16.280.033.846,8

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rancangan Awal Kinerja Tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rancangan Awal Kinerja dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan:

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro.

D. Program Pemberdayaan Usaha Mengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan:

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

E. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan:

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

F. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatalaksanaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

b) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
- Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17						14,494,959,093							16.280.033.846,8		
2	17	1					10,689,968,478						100 %	11,873,912,731		
2	17	1	2.02				8,919,595,988						100 %	9,412,555,851		

2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	8,840,577,988		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41 Orang/bulan	9,330,622,087	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	79,018,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokumen	81,993,764	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				0		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi		100 %	57,200,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan					0		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi		100 %	57,200,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	%	%		100 %	260,958,050		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan		100 %	400.587.403	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139,415,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	274.559.414	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	192,400,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 %	587,967,808	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan					0		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		99,978,832	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	192,400,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48 Unit	249,488,976	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	%	%		0	Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		238,500,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	%	100 %	699,448,640	Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 %	725,258,295	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	322,460,000	Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	334,358,774	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	376,988,640	Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	390.899.521	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	%	100 %	617,565,800	Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan		100 %	690,343,374	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	%	28.81 %	146,837,345		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30.23 %	152,123,490		
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	%	6.74 %	146.837.345,29		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7.08 %	152.123.489,72		
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			65 Unit Usaha	146,837,345		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	70 Unit Usaha	152,123,490	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%	%	83.33%	125.266.176							88.89 %	129.888.497,89	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Persentase yang dinilai kesehatannya	%	%	43.48 %	125.266.176							55.56 %	129.888.497,89	

2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	%		%	19.79 %	251.159.145		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	21.52%	260.200.875	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	5	2.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro				270 Unit Usaha	251.159.145		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	400 Unit Usaha	260.200.875	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	%		%	35.34%	1.061.042.741		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	37.45%	1.100.195.218	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	%		%	482 Unit Usaha	1.061.042.741		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	655 Unit Usaha	1.100.195.218	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				110 Unit Usaha	393.010.200		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	130 Unit Usaha	407.512.276	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha				350 Unit Usaha	366.724.721		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	500 Unit Usaha	380.256.863	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				22 Orang	301.307.820		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	25 Orang	312.426.079	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	%		%	45.45 %	1.943.060.899		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	48.60 %	2.014.759.864	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi	Jumlah usaha mikro yang dibangun dan aktif	Unit Usaha		Unit Usaha	620 Unit Usaha	1.943.060.899		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan	Pelaku Usaha Mikro	850 Unit Usaha	2.014.759.846	DINAS KOPERASI DAN USAHA

					Usaha Kecil								Yang Berkualitas dan Berkeadilan	n Pembangunan Ekonomi.					MIKRO
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			620 Unit Usaha	1.943.060.899		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro Kreatif	850 Unit Usaha	2.014.759.846		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TOTAL										14.494.959.093						-	16.280.033.846,8		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan awal tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rancangan awal kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 yang disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

- a. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

